

**Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan
Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6
Tahun 2018 Di Atr/Bpn Kabupaten Karo**

**Yuda Efrimsa Kembaren
NPM. 1813010007**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Di Atr/Bpn Kabupaten Karo. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan Pelaksanaan PTSL dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. Jenis penelitian hukum yang dilakukan yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PTSL memiliki beberapa kegiatan yang digabungkan dengan kegiatan ataupun program lainnya diantaranya program sertifikat lintas sektor, program sertifikasi massal swadaya masyarakat, program redistribusi massal tanah objek *landform*, konsolidasi tanah, dan transmigrasi dan program sertifikasi massal lainnya atau gabungan dari beberapa program kegiatan yang tertera pada undang-undang. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor hukum serta fungsi pelaksanaan PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat antara lain ialah hambatan teknis, hambatan hukum, faktor adat masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Legal Review on the Implementation of Complete Systematic Land Registration (Ptls) Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Head of the National Defense Agency No. 6 of 2018 at ATR/Bpn Karo Regency

**Yuda Efrimsa Kembaren
NPM. 1813010007**

ABSTRACT

This study discusses the Legal Review of the Implementation of Complete Systematic Land Registration (Ptls) Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Head of the National Defense Agency No. 6 of 2018 at Atr/Bpn Karo Regency. The purpose of this research is to find out the legal review of the implementation of Complete Systematic Land Registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018 at the ATR/BPN Land Office of Karo Regency and to find out the obstacles in the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the ATR/BPN Land Office in Karo Regency and the Implementation of PTSL in the Spatial Planning for the Community. The type of legal research carried out by normative juridical is normative juridical where the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in the legislation.

The results of this study indicate that the implementation of PTSL has several activities combined with other activities or programs including cross-sectoral certificate programs, mass self-help certification programs, mass redistribution programs of landform objects, land consolidation, and transmigration and other mass certification programs or a combination of several program of activities stated in the law. Barriers to the implementation of complete systematic land registration (PTSL) are caused by technical and legal factors as well as the function of implementing PTSL in spatial planning for the community, including technical barriers, legal barriers, and community customar y factors.

Keywords: Legal Review, Complete Systematic Land Registration